

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orientasi pembangunan saat ini dan beberapa tahun silam selalu diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga setiap negara berlomba-lomba meningkatkan roda perekonomiannya demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal, hal ini telah banyak dikritik oleh sebagian ekonom dan ahli lingkungan. Karena pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sebagian besar akan mengabaikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan, sehingga perlu diperhatikan pula pada pemerataan dan keberlanjutan yang merupakan esensi dari pembangunan itu sendiri.

Salah satu indikator yang selalu dijadikan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi, karena variabel ini dapat mudah diukur secara kuantitatif. Ekonomi dikatakan tumbuh jika terdapat kenaikan pendapatan (total maupun individu) sebagai akibat meningkatnya Produk Domestik Bruto dengan mengabaikan kenaikan yang terjadi pada jumlah penduduk, tidak memandang apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak, apakah ketimpangan ekonomi (antar wilayah, masyarakat, dan antar sektor) menurun (Murdiono, 2014).

Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang dicapai berbagai wilayah tidak lantas menjamin terciptanya pemerataan pendapatan antarindividu dan wilayah. Bahkan seringkali pertumbuhan ekonomi dibarengi

dengan adanya ketimpangan dalam pembangunan. Ketimpangan yang paling jelas terlihat adalah pada aspek pendapatan yang menimbulkan golongan kaya dan miskin, aspek spasial yang menimbulkan adanya wilayah maju dan tertinggal serta aspek sektoral yang menimbulkan adanya sektor unggulan dan non-unggulan (Mauliddiyah, 2014).

Hal terpenting dalam pembangunan daerah adalah bahwa daerah tersebut mampu mengidentifikasi setiap potensi sektor-sektor potensial yang dimilikinya kemudian menganalisisnya untuk membuat sektor-sektor tersebut memiliki nilai tambah bagi pembangunan ekonomi daerah (Denny Iswanto, 2015). Pemerintah telah mendorong ke setiap daerah agar mampu mengelola sumberdaya alam yang dimilikinya sebagai sumber pendapatannya. Dalam proses pembangunan ada daerah yang melimpah sumberdaya alam tetapi kurang dalam sumberdaya manusia, namun ada daerah yang sebaliknya kurang dalam hal sumberdaya alam tapi melimpah dalam sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas dan perbedaan infrastruktur. Keadaan ini selanjutnya menyebabkan perbedaan dalam perkembangan pembangunan yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan kesejahteraan di masing-masing daerah dapat terjadi (Yuliadi, 2008).

Dalam setiap pembangunan daerah pasti akan timbul suatu masalah, dalam konteks pembangunan daerah maka ketimpangan antar daerah merupakan masalah yang selalu timbul dalam proses pembangunan. Ketimpangan yang lazim dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi. Hal ini

dianggap wajar terjadi karena terdapat perbedaan kepemilikan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan infrastruktur dari setiap daerah. Ketimpangan ekonomi yang sering dijadikan indikator adalah perbedaan pendapatan perkapita. Pada awal proses pembangunan, pemerintah akan dihadapkan dengan *trade off* antara mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pemerataan distribusi pendapatan. Kuznet telah mengemukakan bahwa pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi, pasti akan terjadi ketimpangan yang tinggi dan berangsur membaik pada tahap selanjutnya. Hipotesis dikenal dengan hipotesis “U-Terbalik” Kuznet, sesuai dengan perubahan distribusi pendapatan dengan ukuran koefisien gini dan PDRB Perkapita yang akan terlihat seperti huruf “U-Terbalik”. Kuznet berkeyakinan distribusi pendapatan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000).

Jakarta sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia, ibu kota negara Indonesia dan salah satu pusat perekonomian di Indonesia. Provinsi Jakarta terdiri dari 5 Kota dan 1 Kabupaten memiliki banyak persoalan yang belum terselesaikan. Kemacetan, banjir dan kebakaran selalu menjadi topik yang diulas setiap tahunnya. Namun masalah Jakarta bukan hanya itu, persoalan yang lebih penting dan harus segera diatasi adalah persoalan pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan. Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk diselesaikan, karena pemerataan adalah cerminan dari pembangunan dan termasuk strategi dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, selain dari pada itu merupakan tujuan pembangunan nasional Indonesia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, hal ini dapat ditinjau dari PDRB Perkapita Povinsi Jakarta. Berikut ini tabel 1. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku dari setiap Kabupaten / Kota di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1.1 PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku menurut Kabupaten / Kota administrasi tahun 2012-2016 (Rupiah)

Wilayah	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kepulauan Seribu	205,787	217,147	231,292	244,830	267,601
Jakarta Selatan	130,921	144,968	162,050	181,736	201,969
Jakarta Timur	77,560	85,803	95,760	108,507	121,542
Jakarta Pusat	328,567	369,464	417,062	470,519	428,649
Jakarta Barat	88,469	96,674	107,935	120,480	133,318
Jakarta Utara	138,084	152,030	169,393	193,080	217,034

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta 2016.

Berdasarkan tabel 1. Menunjukkan bahwa PDRB Perkapita provinsi DKI Jakarta merupakan PDRB Perkapita tertinggi di Indonesia, hal ini menjadi magnet bagi penduduk di luar Jakarta mengadu nasib di Jakarta. Namun bukan berarti tidak ada masalah, tentu hal tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dan Provinsi untuk mengurangi masalah yang ada. Dari tabel diatas juga menunjukkan terdapat ketimpangan pendapatan dalam lingkup provinsi. Hal ini dapat dilihat bahwa PDRB Perkapita paling tinggi ada di Kota Jakarta Pusat, hal tersut dapat didukung bahwa pemerintahan provinsi bahkan negara terletak di Jakarta Pusat. Sedangkan PDRB Perkapita dengan angka terendah adalah Jakarta Timur, namun selalu meningkat setiap tahunnya dimana pada tahun 2011 PDRB Perkapita Jaktim adalah Rp.77.560.710,- meningkat menjadi Rp.121.542.328,- di tahun 2015.

PDRB Perkapita tidak serta merta menjadi patokan utama dalam melihat kesenjangan daerah, melainkan satu dari beberapa indikator yang bisa digunakan oleh peneliti dalam melakukan penjelasan tentang kesenjangan daerah. Dengan kepemilikan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan infrastruktur sangat mempengaruhi PDRB Perkapita Provinsi DKI Jakarta. Indikator lain yang bisa digunakan untuk menjelaskan ketimpangan daerah adalah presentase distribusi PDRB DKI Jakarta berdasarkan Kab/Kota Administrasi.

Tabel 1.2 Presentase Distribusi PDRB berdasarkan Kab/Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta

Kab/Kota Administrasi	Distribusi PDRB			
	2010	2011	2012	2013
Kepulauan Seribu	0,47	0,55	0,51	0,48
Jakarta Selatan	22,13	22,15	22,22	22,00
Jakarta Timur	17,14	16,98	16,96	16,93
Jakarta Pusat	26,5	26,58	26,61	26,87
Jakarta Barat	14,98	14,88	14,83	14,86
Jakarta Utara	18,78	18,86	18,88	18,86

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta 2016.

Tabel 1.2 menunjukkan terdapat perbedaan presentase distribusi terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kab/Kota. Jakarta Pusat merupakan kota yang menyumbang paling tinggi terhadap keseluruhan PDRB di DKI Jakarta, hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Jakarta Pusat relatif berkembang cepat. Sedangkan Jakarta selatan dengan rata-rata 22,23% penyumbang tertinggi kedua bagi PDRB di DKI Jakarta. Sedangkan,

Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan wilayah administrasi yang memiliki presentase terkecil dalam distribusinya terhadap PDRB DKI Jakarta. Hal ini mengindikasikan terdapat perbedaan karakteristik dari setiap daerah, sumber daya alam dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan yang dapat diidentifikasi bagi perkembangan Provinsi DKI Jakarta. Sehingga mampu menurunkan gap antara daerah yang maju dengan yang tertinggal, karena hakikat dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat.

Berangkat dari fenomena ketidakmerataan pertumbuhan dan pembangunan tersebut maka perlu dilakukan kajian yang dapat mengidentifikasi potensi ekonomi masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi DKI Jakarta agar dapat mengurangi ketimpangan pertumbuhan tersebut. Maka peneliti mengambil judul “*Analisis Ketimpangan dan Pengembangan Potensi Ekonomi Regional di Provinsi DKI Jakarta*”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul antara lain:

1. Bagaimana angka ketimpangan regional antar kabupaten dan kota di Provinsi DKI Jakarta?
2. Sektor-sektor manakah yang paling memiliki potensi untuk dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota Provinsi DKI Jakarta?
3. Bagaimana klasifikasi wilayah sebagai identifikasi arah pembangunan yang dapat digunakan dalam pembangunan di DKI Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui angka ketimpangan regional antar kabupaten dan kota di Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui sektor-sektor manakah yang paling memiliki potensi untuk dikembangkan di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui klasifikasi wilayah sebagai identifikasi arah pembangunan di Provinsi DKI Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah :

1. Memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah (BAPPEDA) yang terkait dengan pengembangan potensi di Jakarta guna peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ketimpangan.
2. Dapat menjadi sumber referensi dan informasi tambahan bagi penelitian yang akan datang, khususnya penelitian yang terkait dengan perekonomian.

